

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAMPAK GELNDANGAN DAN
PENGEMIS TERHADAP KRIMINAL DI WILAYAH POLSEK
RAPPOCINI KOTA MAKSSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Pidana dan Ketatanegaraan

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SHERDILLA DWI RATNASARI S
NIM : 10300113071

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sherdilla Dwi Ratnasari S
Nim : 10300113071
Tempat/tgl.Lahir : Lura, 15 Juli 1995
Jur/prodi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Alauddin 3, No.54
Judul : Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan
Pengemis Terhadap Kriminal di Wilayah Polsek
Rappocini Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Agustus 2017

Penyusun

SHERDILLA DWI RATNASARI S
10300113071

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN KRIMONOLOGI DAMPAK GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP KRIMINAL DI WILAYAH POLSEK RAPPOCINI KOTA MAKASSAR", yang disusun oleh SHERDILLA DWI RATNASARI, NIM: 10300113071, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 28 Agustus 2017 M, bertepatan 6 Dzul-Hijja 1438 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 11 September 2017 M.
20 Dzul-Hijja 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamzah Hasan, M. HI	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Alimuddin, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Nila Sastrawati, M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT seru sekalian alam, karena atas rahmatnya dan ridho-NYA, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul ***“Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Kriminal di Wilayah Polseek Rappocini Kota Makassar”*** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) program Studi Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar. Serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabatnya.

Merangkai kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran, dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Muh.Saleng dan ibunda Sumiati tercinta dan nenek tersayang Hj.Cari yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung penulis dan tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, juga untuk saudara/iku tersayang, Sherly Novitasari, Sherdian Tri Yanasari, dan Sherbilal Mushaliq Putra, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, M.Hi, selaku Sekretaris Jurusan Pidana dan Ketatanegaraan
4. Dra. Nila Sastrawati, M.Si sebagai pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan-masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Azhar Sinilele, SH., MH juga selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penelitian dalam skripsi ini..
5. Dr. Hamzah Hasan, M.HI sebagai pennguji I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan masukan-masukan yang membangun terkait penelitian yang dilakukan. Dan Bapak Dr. alimuddin,M.Ag yanh juga sebagai penguji II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penelitian dalam skripsi ini.
6. Aparat Kepolisian Sektor Rappocini kota MAkassr, yang banyak membantu dan senantiasa menyempatkan waktu selama masa penelitian berlangsung.
7. Sahabat terbaik Ria, Rini, Indah, Wawan, Ando, Dayat, Sulpandi, kak Wandu, Ari, Anti dan Teman-teman terkasih HPK B 2013, dan terkhusus untuk Kasriadi(Alm) terima kasih banyak atas kebersamaan dan bimbingannya selama ini.

8. Teman-teman seperjuangan, segenap mahasiswa/i HPK 2013
9. Teman-teman KKN-Reg Angkatan 53 Kec.Tinggimoncong, Kel.Bulutana Malino, Kab.Gowa, terkhusus lingkungan Pallangga, Posko 3, Ria(lagi), Ravidha dan Sahria.
10. Sahabat SMA, terkhusus Mardha, Ika, Usfi, Evi dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan, yang sampai saat ini masih setia menjadi sahabat penulis.
11. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selama ini membantu dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah mungkin menjadi sempurna., dengan mengingat setiap kekurangan yang ada, meski penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis mengerti bahwa hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi. Mohon para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Penulis

SHERDILLA DWI RATNASARI S

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13-50
A. Pengertian Kriminologi.....	13
B. Gelandangan dan Pengemis	24
C. Kriminalitas.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	51-55
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Data	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56-75

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Analisis Dampak Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Terhadap Tingkat Kriminal Di Wilayah Rappocini Kota Makassar	59
C. Upaya Mengatasi Terjadinya Kriminal Yang Ditimbulkan Oleh Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar	64
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dalam Timbulnya Kriminalitas	73
BAB V PENUTUP.....	76-77
A. Kesimpulan	76
B. Implikasi Penelitian.....	77
KEPUSTAKAAN	78-80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI

Tabel	I	Tentang Fokus Penelitian dan Deskripsi.....	62
-------	---	---	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fat ah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fat ah</i> dan <i>y '</i>	ai	a dan i
و	<i>fat ah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ... ا ...	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>y '</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *m ta*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَمُوتُ: *yam tu*

4. T ' marb ah

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb* ahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaankedua kata itu terpisah, maka *t ' marb* ahituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rau ah al-a f l*

: الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al-mad nah al-f ilah*

: الْحِكْمَةُ *al- ikmah*

5. Syaddah (*Tasyd d*)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan sebuahtanda *tasyd d* (ّ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: رَبَّنَا *rabban*

: نَجَّيْنَا *najjain*

: الْحَقَّ *al- aqq*

: نَعْمَ *nu“ima*

: عُدُّوْ *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf*maddah* menjadi ī.

Contoh:

: عَلَيَّ *‘Al* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

: عَرَبِيَّ *‘Arab* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلْدُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْغُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِّرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh billāh دِينَ الله

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-Jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkatamub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Ab* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *sub nah wa ta' l*

saw. = *allall hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sal m*

H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riway at

ABSTRAK

NAMA : SHERDILLA DWI RATNASARI S

NIM : 10300113071

JUDUL : Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Kriminal di Wilayah Polsek Rappocini

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi dampak gelandangan dan pengemis terhadap kriminal di wilayah Polsek Rappocini. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa sub masalah yaitu : 1)bagaimana dampak gelandangan dan pengemis terhadap kriminal di wilayah Polsek Rappocini ?, 2)bagaimana mengatasi terjadinya Kriminal yang ditimbulkan oleh Gelandangan dan Pengemis di wilayah Polsekt Rappocin Kota Makassar?, serta 3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriminal yang ditimbulkan oleh Gelandangan dan Pengemis di wilayah Polsekt Rappocin Kota Makassar ?

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan syar'i. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara, observasi, dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Polsek Rappocini Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keberadaan gelandangan dan pengemis tidak membawa dampak yang terlalu besar terhadap jumlah kriminalitas di wilayah Polsek Rappocini, hal ini dikarenakan jumlah kasus yang pelakunya adalah gelandangan dan pengemis hanya beberapa persen dari keseluruhan kasus yang ditangani oleh pihak Polsek Rappocini. Untuk mengatasi hal itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat, karena hal ini termasuk patologi sosial yang menjadi tanggungjawab bersama. Disamping itu Hukum Islam juga memiliki pandangan tersendiri terkait kriminalitas gelandangan dan pengemis. dalam hal ini Islam tidak membedakan aturan hukum bagi gepeng atau yang bukan gepeng, karena Hukum Islam bersifat adil dan tidak memihak.

Implikasi dari penelitian ini bahwa sebaiknya untuk mencegah peningkatan kasus kriminal oleh gelandangan dan pengemis (gepeng), sangat diperlukan adanya koordinasi dari semua pihak, karena hal ini menyangkut permasalahan dalam masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah beserta instansi-instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan penanganan permasalahan terkait gelandangan dan pengemis (gepeng).

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam aktifitas sehari-hari kita sering mendengar istilah gelandangan dan pengemis yang disingkat gepeng. Apapun sebutan yang dipakai, semua istilah itu merujuk pada orang-orang yang sering lalu lalang di jalanan untuk mencari sesuap nasi. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang akut. Keduanya menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun di kota kecil. Hal ini karena penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan yang hingga saat ini belum berhasil dituntaskan hingga ke akar-akarnya.

Berbagai variabel fundamental yang memengaruhi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan seperti kemiskinan, ledakan urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formal, tingginya angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan etos kerja yang rendah, belum berhasil diatasi. Sehingga gelandangan dan pengemis terus meningkat dan merupakan fenomena kemiskinan kota, sama halnya fenomena yang dihadapi di kota Makassar.

Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian pasal 34 ayat 2 menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 dan 2 UU 1945 dan UU Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, peraturan

pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada bagian pertimbangan menyatakan : a) Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. b) bahwa usaha penanggulangan tersebut di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai warga negara republik Indonesia.¹

Selain itu hal yang perlu menjadi perhatian adalah dampak dari keberadaan gelandangan dan pengemis itu sendiri. Tidak jarang kita menemui beberapa tindak kriminal yang dilakukan gelandangan dan pengemis dengan dalih permasalahan ekonomi, suatu hal yang pasti bahwa kemiskinan bukanlah barang baru dalam masyarakat, sebelumnya juga telah terjadi kemiskinan, kesengsaraan, dan terjadi penindasan seperti yang saat ini dihadapi, hanya saja sifat dan kondisinya berbeda.

Sebut saja gelandangan dan pengemis, salah satu produk kemiskinan yang pada keadaan seperti ini akhirnya melahirkan para pelaku tindak kejahatan. Kurangnya perhatian dari pemerintah sering kali menjadi alasan keberadaan kelompok ini di tengah-tengah masyarakat. Adanya kesenjangan sosial dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik,

¹Irsan Suandi, "Gelandangan dan Pengemis", *Blog Irsan Suandi*. <http://andisuandirsan.blogspot.com/2015/04/makalah-gelandangan-dan-pengemis.html> (10 Agustus 2017)

solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal disebut palotogi sosial.²

Namun meski demikian, kita tidak dapat menyalahkan para gelandangan dan pengemis (gepeng) atas kondisi tersebut karena setiap individu yang bernyawa memiliki keinginan untuk hidup layak dan berkecukupan.

Tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan yang jelas, buruknya hubungan sosial, pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik, hidup dibawah garis kemiskinan, serta adanya keinginan yang tidak dapat tercapai dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal diluar batas, seperti contohnya seseorang mencuri untuk mendapatkan uang, entah itu bertujuan untuk sesuatu yang baik atau buruk tetap saja perbuatannya merupakan hal yang harus dikenakan sanksi.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak faktor penyebab dari kriminalitas ini dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian, mulai dari pencurian, kekerasan, hingga sampai pada pelecehan seksual kerap terjadi dan tidak sedikit yang memakan korban jiwa.

Sejatinya pemerintah telah melakukan upaya mengurangi keberadaan gepeng (gelandangan dan pengemis) dengan cara mendirikan pusat dan pelayanan rehabilitasi dan panti sosial serta kegiatan-kegiatan sosial, namun hal seperti itu tidak dapat serta merta dapat membuahkan hasil mengingat jumlah dan keberadaan mereka yang tidak menentu. Namun dalam beberapa kasus kita melihat orang atau kelompok yang mampu keluar melepaskan diri dari himpitan

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), h.1

kemiskinan, mampu beranjak dari kondisi yang serba kekurangan menuju kondisi yang serba berlimpah.³

Cara pandang, gaya hidup, kecenderungan berpikir, pilihan hidup, semua menuju kubangan besar yang bernama *hedonisme* dan saudara kembarnya, *materialisme*. Sebenarnya materialisme sendiri bukan merupakan ideologi baru, melainkan ideologi tua yang sejak lama hadir membuntuti anak-anak adam sebagaimana diilustrasikan dalam kisah Habil-Qabil, mereka berebut “perempuan” dan “harta”, suatu manifestasi paling vulgar atas materi dalam kacamata maskulin. Dengan demikian sejak manusia pertama, materialisme telah menjadi berhala besar menggantikan kedudukan Tuhan. Sebagai anak cucu yang mewarisinya, Marxisme, Modernisme, Kapitalisme, Eksistensialisme, semuanya juga berdiri di atas *manhaj* materialisme. Segala sesuatu hanya dapat diukur dengan parameter materialistik. Pembangunan, pendidikan, kemajuan, kesejahteraan, bahkan dalam prakteknya, kesalehan beragama seseorang pun juga diukur melalui kaca mata kuda materialisme : berapa jumlah sedekah, berapa kali naik haji, berapa tempat ibadah yang berhasil dibangun, semua diukur dengan satuan kuantitatif *an sich*.⁴

Dalam Islam juga dibahas gelandangan, pengemis dan kriminalitas sebagai masalah antar hubungan manusia. Bahkan tidak sedikit ayat dalam Al-Quran yang menyinggung persoalan kejahatan, mulai dari perbuatan, pengadilan ,peradilan serta sanksinya pun disebutkan. kriminalitas atau yang Dalam perspektif hukum Islam disebut dengan Jarimah dianggap sebagai perbuatan-perbuatan tercela dan dikenakan sanksi atasnya. Dan seorang mukmin juga menyadari bahwa pada hari

³Tim Pengelola Short Cut, *Pengantar Ekonomi Politik*, (Yogyakarta, Resist Institute, 2011), h.2.

⁴Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h.vii.

kiamat nanti ia akan dibangkitkan kembali dan di hisab seluruh amal perbuatannya, dan hal ini adalah ketetapan yang pasti, sesuai firman Allah swt dalam QS Al-Zalzalah/99: 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Terjemahnya :

7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.⁵

8. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.⁶

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa jangankan perbuatan kriminal yang jelas sangat berbahaya, hal sekecil dzarrahpun akan dibalas , apalagi bila itu merupakan hal yang sangat dilarang Tuhan.

Salah satu paradigma yang harus dibenahi adalah pandangan tentang ketaatan beragama, terutama bagi orang miskin. Terlebih khusus lagi bagi kaum gelandangan yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang sering kali bertentangan dengan ajaran formal Islam. Kaum gelandangan sebagai kelompok marginal yang terlempar jauh dari kehidupan masyarakat, telah menumbuhkan budaya mereka sendiri, “budaya miskin” dan Islam diharuskan mengambil sikap untuk budaya seperti itu yang sering kali menyimpang unsur-unsurnya dari ajaran Islam.⁷

Masalah kriminalitas yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis seperti yang telah diuraikan diatas banyak terjadi karena beberapa faktor. Yang perlu dilakukan adalah meminimaliskan jumlah gepeng untuk meminimaliskan

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*.

⁷Abdurrahman Wahid, “Gelandangan : Tinjauan Dari Pandangan Islam”, komentar, <https://m.facebook.com/filegusdur/posts/258732910962259> , pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 21.30

pula kasus kriminal meskipun disisi lain juga sangat diketahui bahwa gepeng bukan satu-satunya penyebab timbulnya kriminalitas.

Kejahatan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan dengan mengacu pada persentase kasus kejahatan yang ada pada kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, dengan data-data yang tercatat tersebut dapat kita pahami bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perilaku kejahatan yang cukup tinggi.

Kriminalitas atau kejahatan itu sendiri bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita dan dapat berlangsung pada usia anak, remaja, dewasa maupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar.

Namun, bisa juga dilakukan dengan cara setengah sadar misalnya, didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi.⁸ Kejahatan juga bisa dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa harus menyerang yang tidak jarang berakhir dengan terjadinya peristiwa pembunuhan.⁹

Masyarakat yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan materiil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki

⁸Obsesi, *obsessio* : pikiran yang tidak bisa dilenyapkan, gambaran paksaan, seolah-olah dikejar-kejar oleh hantu jahat.

⁹Dr. Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.139.

harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Dengan kata lain bisa dinyatakan, jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa ini mendorong individu maupun kelompok untuk melakukan tindak kriminal. Atau jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi *maladjustment* ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.¹⁰

Segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dari hal-hal tersebut. Demikian pula dengan kriminalitas yang kerap dijumpai dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa faktor penyebabnya bisa berasal dari beberapa aspek kehidupan. Sebelum membahas lebih lanjut harus dipahami terlebih dahulu bahwa kriminalitas atau tindak kriminal adalah perilaku atau perbuatan yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang oleh negara telah ditetapkan suatu sanksi terhadapnya. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum : Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan *KUHP*.¹¹

Sehubungan pula dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa pada abad ke-16 hingga abad ke-18 hukum pidana semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang

¹⁰Dr. Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.141.

¹¹Dr. Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta,Rajawali Pers, 2009), h.143-144.

dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Yang menjadi tujuan pada waktu itu adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan.¹²

Dengan berpedoman pada pemikiran dan cara pandang diatas, maka dapat dipahami bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang faktor pendorong individu atau suatu kelompok melakukan tindak pidana adalah karena adanya tujuan yang ingin dicapai dan di tempuh dengan cara yang tidak wajar.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Terjadinya Kriminal di Wilayah Polsekta Tamalate Kota Makassar .

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Terjadinya Kriminal di Wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, di perlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni : Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Terjadinya Kriminal di Wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,(Jakarta, Rajawali Pers, 2001), h. 4.

1. Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labelling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.¹³

2. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum sehingga hidup tak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Gelandangan dan pengemis (gepeng) adalah seorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, dan berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

¹³Enda Hasbi Hasibullah, *Kriminologi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2016), h.367

3. Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/beberapa orang sekaligus, yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.¹⁴

C. *Rumusan Masalah*

Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Terjadinya Kriminal di Wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar. Di perolehlah sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Gelandangan dan Pengemis terhadap tingkat kriminal di wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar ?
2. Bagaimana mengatasi terjadinya Kriminal yang ditimbulkan oleh Gelandangan dan Pengemis di wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar ?
3. Bagaimana Hukum Islam menanggapi tindak kriminal yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis ?

D. *Kajian Pustaka*

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah pengaruh gelandangan dan pengemis terhadap timbulnya kriminalitas. Adapun literatur yang menjadi rujukan antara lain :

Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menjelaskan beberapa penyimpangan dan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan tindak pidana , salah satu diantaranya adalah akibat permasalahan

¹⁴Pengertian Kriminalitas, diakses dari <http://www.pengertianmenurutahli.net/pengertian-kriminalitas-dan-contohnya/.html>, pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 15.30

ekonomi yang sangat sering dihadapi oleh masyarakat. Namun buku ini tidak membahas secara khusus mengenai peran gelandangan dan pengemis dalam jumlah kasus kejahatan

Kartini kartono dalam buku yang bertajuk *Kenakalan Remaja*, yang merupakan jilid kedua dari *Patologi Sosial*. Mengkhususkan pembahasan lebih lanjut tentang patologi sosial yang mewabah dikalangan remaja. Akan tetapi buku ini membahas permasalahan remaja secara umum, yang berarti tidak memusatkan pembahasan pada remaja yang berstatus gelandangan dan pengemis.

Ende Hasbi Nasaruddin dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi* suatu pengetahuan teoritis tentang kriminologi, membahas lebih dalam dan rinci mengenai setiap hal yang berhubungan dengan kriminalitas akan tetapi tidak membahas hubungan antara gelandangan dan pengemis dengan kriminalitas secara spesifik.

Eko Supriyadi dalam buku berjudul *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati* yang membahas tentang tindak kriminal dari segi agama, moral dan budaya memaparkan bagaiman Islam terhadap pelanggaran yang bahkan telah memiliki peraturan dan sanksinya itu namun tidak membahas pengaruh gepeng terhadap jumlah kejahatan.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam bukunya *Kriminologi* memberikan penjelasan mengenai hubungan kejahatan dengan psikologi dan sosiologi, serta menyajikan teori-teori penyimpangan budaya akan tetapi tidak membahas mengenai dampak gelandangan dan pengemis terhadap kriminalitas.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penulisan Tugas Akhir dengan tujuan dan kegunaan:

1. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gelandangan dan pengemis terhadap persentase kasus kejahatan di wilayah hukum Polsekta Rappocini Kota Makassar.

2) Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dampak gelandangan dan pengemis terhadap timbulnya kriminal di wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar.
2. Untuk mengkaji bagaimana cara mengatasi terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di wilayah Polsekta Rappocini Makassar.
3. Untuk memahami bagaimana hukum Islam menanggapi dan memandang tindak kriminal yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang dampak gelandangan dan pengemis terhadap timbulnya kriminal.
- 2) Sebagai suatu kajian dan evaluasi terhadap penerapan penyidik dalam mengumpulkan data serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis dan bagaimana cara mengatasi terjadinya kriminalitas yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Pengertian Kriminologi*

Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.¹

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic kriminiel*" yang kini

¹Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.23.

dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.²

Selain secara etimologi, ada berbagai macam bentuk definisi dari kriminologi yang dikembangkan oleh para ahli hukum diantaranya adalah:

1. Bonger (1934)

Bonger (1934) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya mempelajari patologi sosial.³

Bonger, dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi kedalam dua aspek sebagai berikut :

- a. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
- b. Kriminologi teoretis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 9.

³Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 63.

Dalam kriminologi teoretis Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut :

1. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan(*etiologi sosial*).
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang memandang kejahatan dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan , antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang memandang kejahatan karena sakit jiwa atau sakit saraf, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya penghukuman, serta manfaat penghukuman.
6. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
7. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisis tentang hubungan antara kejahatan dan kemiskinan.

2. Sutherland (1960)

Menurut Sutherland (1960), bidang kriminologi adalah proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut,

dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Hubungan interaksi dari ketiga hal tersebut merupakan objek studi dari kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut, Sutherland(1960) membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, yaitu sebagai berikut⁴ :

1) *The sociology of law is an attempt at scientific analysis of the conditions under which the criminal law developes and which is seldom include in general books* (Sosiologi kriminal, bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah) ;

2) *Criminal etiologi is an attempt at scientific analysis of the causes of crime* (Etiologi kriminal, bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisi ilmiah) ;

3) *Penology is concerned with the control of crime. The term penology is unsatisfactory because this division includes many methods of control which are not penal in character* (Penologi, artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan).

3. Manheimm(1965)

Manheimm(1965) melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat nonpunit. Dalam arti sempit, kriminologi hanya mempelajari kejahatan.⁵

⁴Ende Hasbi Nassaruddin,*Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia,2016), h. 61.

⁵Ende Hasbi Nassaruddin,*Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia,2016), h.64.

Menurut Manheimm, kajian terhadap tingkah laku jahat terdiri atas tiga bentuk dasar :

- 1) Pendekatan deskriptif, yaitu pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
 - 2) Pendekatan kausal, yaitu penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi secara individu.
 - 3) Pendekatan normatif, yaitu bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum ataupun persamaan serta kecenderungan kejahatan.
4. Haskell dan Yablonsky (1974)

Haskell dan Yablonsky 1974 (Mulyana W Kusumah, 1982) menekan definisi kkriminologi pada muatan penelitiannya dengan mengatakan bahwa kriminologi secara khusus adalah disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi⁶ :

1. Sifat dan tingkah kejahatan;
 2. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas;
 3. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana;
 4. Ciri-ciri kejahatan;
 5. Pembinaan pelaku kejahatan;
 6. Pola-pola kriminalitas;
 7. Dampak kejahatan terhadap perubahan sosial.
5. Wolfgang, Savitz dan Johnston

Dalam *The Sociologi of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang

⁶Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, h.65.

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁷

6. Mr. Paul Moedigno Moeliono

Mr. Paul Moedigno Moeliono (kriminologi Indonesia) menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.⁸

7. Noach

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Noach juga memiliki pendapat berbeda mengenai kajian kriminologi. Noach membagi kriminologi menjadi dua pengertian yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat kriminalitas.⁹

Sesuai dengan pengertian diatas bahwa kriminologi menurut Noach dibagi menjadi 3 (tiga) dapat diperjelas dengan adanya unsur-unsur yakni;

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.11.

⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.122.

⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.12.

- a. Bentuk-bentuk gejala (fenomena), bentuk-bentuk gejala yang mudah diketahui ialah yang berdasarkan pada norma-norma dari ilmu-ilmu pengetahuan lain seperti hukum pidana dan etika;
- b. Sebab-sebab kriminalitas (etiologi) yang berhubungan dengan lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat dan alam;
- c. Akibat-akibat kriminalitas sampai berapa jauh dapat dianggap masih meliputi oleh kriminologi.

Selanjutnya Noach membagi kriminalistik menjadi pengetahuan tentang lacak-lacak yakni bekas tanda-tanda yang ditinggalkan penjahat, termasuk bekas persiapan dan pelaksanaan serta perbuatan sesudahnya untuk menutupi perbuatan sesungguhnya.¹⁰ Dengan demikian meliputi penyidikan tentang :

- a. Identitas si penjahat (*dactiloscopy*: pemeriksaan tulisan dan perbandingannya, dan ciri-ciri lain);
- b. Alat-alat (umpamanya senjata api)
- c. Pemeriksaan tentang uang kertas/logam palsu, hal-hal mana yang membutuhkan pertolongan ahli kimia.

Selain pembagian kriminologi menurut Bonger dan beberapa ahli lainnya terdapat pula kriminologi terapan yang berupa :

1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

¹⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.141

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientifique*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).¹¹

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu¹²:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.15.

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h.22.

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat.

Selain teori dasar tentang kriminologi dan pembagiannya yang telah dijelaskan sebelumnya, juga perlu diketahui teori kriminologi yang membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan atau yang disebut faktor etiologi yaitu sebagai berikut¹³ :

¹³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.22.

1. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi social, proses-proses sosial, struktur-struktur social dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Penyebab terjadinya kejahatan terdiri dari faktor endogen dan eksogen, yaitu sebagai berikut¹⁴:

1. Faktor endogen

Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya – diri – atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),h.109

kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar.

2. Faktor eksogen

Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pidana yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, yaitu sebagai berikut¹⁵:

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok;
2. Kesempatan untuk menjadi pencuri;
3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial;

¹⁵Suryanto, Perilaku Kriminal, diakses dari <http://suryanto.blog.unair.ac.id/2008/12/04/perilaku-kriminal-ditinjau-dari-aspek-psikologi-pelaku/html>, pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 13.23

4. *Atavistic trait* atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal;

5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.

B. *Gelandangan dan Pengemis*

1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis atau yang sering disingkat gepeng¹⁶, secara umum sudah sangat akrab dengan masyarakat dan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar khususnya di Kota Makassar

Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah Tunawisma.¹⁷ Kemudian kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah populer yang sering digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut gelandangan dan pengemis adalah *Homeless*.¹⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (21) tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Dijelaskan bahwa,

¹⁶Godam64, “Arti Gepeng-Akronim Tidak Resmi Bahasa Indonesia”*Blog Godam64*. <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-gepeng-kepanjangan-dari-gepeng-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html?m=1> (10 juni 2017)

¹⁷ Magfud Ahmad, 2010, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (gepeng), *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*: Vol.7 No.2, Pekalongan, h.2.

”gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap”.dan dalam Pasal 1 ayat (22) disebutkan pula gelandangan psikotik yang adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa. Kemudian Pasal 1 ayat (23) menjelaskan, “pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.¹⁹

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan dan pengemis, yaitu: gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang”.²⁰ Berikutnya, pengemis adalah “orang yang meminta-minta”.²¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial. Menjelaskan, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan

¹⁹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “PERDA No.2 Tahun 2008”, Official Website Pemerintah Sul-Sel, <http://makassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/11/PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2008-TENTANG-ANJAL-DAN-GEPENG.pdf> (10 juni 2017)

²⁰Pengertian gelandangan , Diakses dari <http://kbbi.web.id/gelandangan.html> pada 12 Juni 2017 pukul 09.16 WITA

²¹Pengerian pengemis, Diakses dari <http://kbbi.web.id/pengemis.html> pada 12 Juni 2017 pukul 09.16 WITA

sosial di Indonesia, maka Undang-undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan pelaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam lingkup ini gelandangan dan pengemis jelas sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga masalah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis. Kemudian, menurut Muthalib dan Sudjarwo gelandangan dan pengemis adalah kelompok yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan, mereka sudah terbiasa hidup dengan kemiskinan dan ketebatasan.

Selanjutnya, menurut Pasurdi Suparlan, Gelandangan berasal dari kata gelandang dan mendapat akhiran “an”, yang selalu bergerak, tidak tetap dan berpindah-pindah. Suparlan juga mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencariannya relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar masyarakat kecil yang merupakan suatu masyarakat yang lebih luas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada pada masyarakat gelandang tersebut tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup masyarakat kecil itu.

Kemudian, Ali Marpuji menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Mengutip pendapat Wirosardjono maka Ali Marpuji juga menyatakan bahwa

gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.

Begitu juga Menurut Y. Argo Twikromo, Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya. Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk mempertahankan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan pengasong. Perjuangan hidup sehari-hari mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karna tekanan ekonomi, tetapi juga tekan sosial budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat ataupun petugas ketertiban kota.

Selanjutnya menurut Dimas Dwi Irawan, Khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit.

Dengan mengutip definisi operasional sensus penduduk maka gelandangan terbatas pada mereka yang memiliki tempat tinggal yang tetap, atau tempat tinggal tetapnya tidak berada pada wilayah pencacahan. Karena wilayah

pencacahan telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang lazim, maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini adalah orang-orang yang bermukim pada daerah-daerah bukan tempat tinggal seperti dibawah jembatan, kuburan, pinggiran sungai, emperan toko, sepanjang rel kereta api, taman, pasar, dan konsentrasi hunian gelandangan yang lain.

Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat dari pada pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal walupun itu tidak tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan meminta-minta di muka umum untuk penghasilannya.

2. Kriteria Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 5 dan pasal 6 tentang penanganan gelandangan dan pengemis menjelaskan, gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

- a. Tanpa kartu tanda penduduk.
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap.
- c. Tanpa penghasilan yang tetap.
- d. Tanpa rencana hari kedepan anak-anaknya maupun dirinya.

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
- b. Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
- c. Berada di tempat-tempat umum.
- d. Memperalat sesame untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Namun secara spesifik, karekteristik gelandangan dan pengemis dapat dibagi:

a. Karakteristik Gelandangan

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 19-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- 2) Tidak mempunyai tanda pengenalan atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.

b. Karakteristik Pengemis

- 1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 19-59 tahun.
- 2. Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3. Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisai tertentu.

4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur pada penduduk pada umumnya.²²

c. Faktor-Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau patologi Sosial. Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa dintegrasiakan dalam pola tingkah laku umum dikatagorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.²³

Pada umunya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang meminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan.²⁴

Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu;²⁵

a. Merantau dengan modal nekad

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan

²² Brain Harefa, "Makalah Gepeng", diakses dari <http://www.academia.edu /6492300 /MAKALAH GEPENG>, pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 16.48

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4.

²⁴ Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan Pengemis(Gepeng)", *Jurnal Penelitian*, diakses dari <http://e-journal.stain pekalongan.ac.id/ index. Php/ Penelitian/article/view/108/87>, pada tanggal 11 juni 2017 pukul 17.01

²⁵ Dimas Dwi Irawan, "*Pengemis Undercover, Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*", (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), h.6.

ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

b. Malas Berusaha

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enak saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis di bidang kerja. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

d. Tidak adanya lapangan pekerjaan

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

e. Tradisi yang turun temurun

Menggelandang dan mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucu.

f. Mengemis dari pada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran dari pada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.

g. Harga kebutuhan pokok yang mahal

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berfikir tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

h. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

i. Ikut-ikutan saja

Kehadiran pendatang baru bagi gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan

pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis.

j. Disuruh orang tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

k. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh hipnotis dan obat bius. Peristiwa seperti itu dapat membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya pilihan lain akhirnya merekapun memutuskan untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang dan bertahan hidup di kota.

Sementara itu, Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.

Penyebab munculnya masalah sosial seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Masalah Kemiskinan

Secara garis besar gelandangan dan pengemis tersebut terbagi menjadi dua tipe yaitu, gelandangan pengemis miskin materi dan gelandangan pengemis miskin mental. Gepeng yang miskin materi adalah mereka yang tidak mempunyai uang atau harta sehingga memutuskan untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Berbeda jauh dengan gepeng miskin materi, dalam hal ini gepeng miskin mental masih mungkin memiliki harta benda namun mental yang dimiliki membuat atau mendorong mereka menggelandang dan mengemis. Maksud dari mental disini adalah mental malas untuk melakukan sesuatu. Malas adalah sebuah sikap dan sifat apabila lama dipendam dan diikuti akan mempengaruhi mental, karena terbiasa malas atau mendapat kemudahan secara instan membuat seseorang bermental seperti ini.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Dalam Perspektif *mikro*, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Diantaranya, seperti lamban dalam bekerja, tidak memiliki keahlian, keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, itu ditandai dengan adanya keterbatasan peluang dan kesempatan untuk bekerja.

Menurut Amien Rais, pembangunan Indonesia khususnya dalam 25 tahun terakhir ini telah menunjukkan berbagai hasil fisik dalam bentuk aset-aset pembangunan yang menakjubkan. Akan tetapi, kalau dilihat lebih lanjut, maka

masih banyak juga berbagai *liabilities*²⁶ yang muncul dalam bentuk pengorabanan-pengorbanan (*sosial cost*) baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Antara lain kemiskinan dan kesenjangan masih merajalela. Dari pengamatan mengenai kelompok-kelompok miskin di Indonesia, maka dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kelompok:²⁷

1. Kelompok fakir miskin (termasuk keluarga dan anak yang terlantar)
2. Kelompok informal (termasuk kaki lima, asongan dll)
3. Kelompok petani dan nelayan
4. Kelompok pekerja pasar (termasuk kuli di pelabuhan)
5. Kelompok pegawai negeri dan ABRI, khusus golongan bawah, dan
6. Kelompok pengangguran (termasuk Sarjana)

Sedangkan Parsudi Suparlan menggambarkan dengan terperinci bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari keadilannya sebagai masalah oleh orang yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin (gelandangan dan pengemis), kemiskinan merupakan suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri sebagaimana hidup dalam kemiskinan.²⁸

²⁶Liabilities atau liabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban, Diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/liabilitas> pada 15 Juni 2017 pukul 19.16 WITA

²⁷Eriyanto, Analisis Wacana: pengantar analisis teks media oleh Amien Rais, <http://books.google.com>> books, pada tanggal 11 Juni 2017, pukul 20.32

²⁸Eriyanto, Analisis Wacana: pengantar analisis teks media oleh Amien Rais, <http://books.google.com>> books, pada tanggal 11 Juni 2017, pukul 20.32

Sedangkan menurut Ketut Sudhana Astika, kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis berciri kapitalisme. Sehingga yang mempunyai kemungkinan besar untuk memiliki kebudayaan kemiskinan adalah kelompok masyarakat yang berstrata rendah, mengalami perubahan sosial yang drastis yang ditunjukkan oleh ciri-ciri:

Pertama, kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat, yang berakibat munculnya rasa ketakutan, kecurigan tinggi, apatis dan perpecahan.

Kedua, pada tingkat komunitas lokal secara fisik ditemui rumah-rumah dan pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol, dan rendahnya tingkat organisasi diluar keluarga inti dan keluarga luas.

Ketiga, pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-anaknya.

Keempat, pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan pada tingkat dan rasa rendah diri.

Kelima, tingginya rasa tingkat kesengsaraan, karna beratnya penderitaan ibu, lemahnya struktur pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kurangnya kesabaran dalam hal menunda

keinginan dan rencana masa depan, perasaan pasrah/tidak berguna, tingginya anggapan terhadap lelaki, dan berbagai jenis penyakit kejiwaan lainnya.

Keenam, budaya kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit bagi kelompoknya, mereka hanya tahu kesulitan-kesulitan, kondisi setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri, tidak adanya kesadaran kelas walau mereka sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status.²⁹

Oleh sebab itu, Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi.

b. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan.³⁰

Dalam dunia kerja, kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Apabila seseorang berpendidikan rendah dalam arti hanya memiliki ijazah sekolah dasar akan sangat sulit untuk

²⁹Ketut Sudhana Astika,"Budaya Miskin di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Budaya Miskin di Masyarakat", *jurnal ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ.Udayana Vol.1 No.1, Tahun 2010, h.23-24.*

³⁰Ketut Sudhana Astika,"Budaya Miskin di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Budaya Miskin di Masyarakat", *jurnal ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ.Udayana Vol.1 No.1, Tahun 2010, h.22.*

mendapat sebuah pekerjaan yang layak. Sedangkan gelandangan dan pengemis juga memerlukan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.³¹

Dari rendahnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis inilah yang membuat mereka terpaksa hidup dalam keterbatasan yang sampai mengakibatkan mereka harus tinggal di alam terbuka dan bekerja dengan cara meminta-minta.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, keterampilan dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada lingkungan sekitar. Potensi diri dapat digalih di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat erat kaitannya dengan keterampilan, orang yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan rendah juga. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi.³²

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, ciri-ciri orang yang berada dalam garis kemiskinan adalah orang hidup di kota dengan usia muda namun tidak memiliki keterampilan. Sehingga tidak ada jalan lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya mereka pun harus mengemis di tempat-tempat umum.

³¹Isma Riskawati, Abdul Syani, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”,*Jurnal Sociologie*, Vol.1, No.1, (September 2013),h.50.

³²Isma Riskawati, Abdul Syani, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”,*Jurnal Sociologie*, Vol.1, No.1, h.50.

Oleh karena itu, kegiatan menggelandang dan mengemis adalah pilihan yang paling gampang untuk dilaksanakan guna memperoleh penghasilan secara mudah. Tetapi menurut mereka, mengemis itu terkadang agak sulit untuk memperoleh uang karena harus berkeliling dan mencoba serta mencoba untuk meminta-minta, dimana tidak semua calon pemberi sedekah langsung memberikannya, dan bahkan tidak memperdulikannya.

d. Masalah Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya terjadi karna dipikiran para gepeng muncul kecenderungan bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Sehingga membudaya oleh para gepeng untuk memperoleh penghasilan di muka umum.

Gelandangan dan pengemis sudah menjadi budaya yang melekat dalam diri mereka, budaya malu dan harga diri sudah tidak di pertahankan lagi. Dengan begitu harga diri sudah tidak menjadi hal yang berharga bagi mereka.³³

Hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis,yaitu:

- 1) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- 2) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

³³Isma Riskawati, Abdul Syani, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”,*Jurnal Sociologie*, Vol.1, No.1, (September 2013),h.51.

3) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis, karna mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membenahi mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencarian.³⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor sosial budaya yang menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial melalui bukunya yang berjudul *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat*, faktor terjadinya gelandangan dan pengemis disebabkan sikap masyarakat sekitar gelandangan yang kurang peduli. Faktor ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan hukum, gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di wilayah yang sebetulnya dilarang dijadikan tempat tinggal dan hidup berkeliaran di jalan-jalan atau tempat umum serta tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang dicatat dikelurahan, RT/RW setempat.³⁵ Dari semua faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis yang diuraikan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah faktor yang krusial yang menyebabkan terjadinya dan timbulnya/lahirnya gelandangan dan pengemis.

³⁴ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Depsos RI, Jakarta, 2005, h.7-8

³⁵ Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat*, Jakarta, Depsos RI, 2004, h.11.

C. *Kriminalitas*

1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.³⁶

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu: Pertama, Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. Kedua, Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.

Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*Criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Bagaimanapun im-moril nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana.³⁷

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.122.

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h.124.

Pengertian kriminalitas menurut Beberapa para ahli :

a) Menurut R. Susilo

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

b) Menurut M.v.T

Kriminalitas yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

c) Menurut M. A. Elliot

Kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

d) Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro

Kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.³⁸

³⁸ Kriminologi, diakses dari <http://edyblogspot.com-kriminalitas>, pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 21.30

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderitanya atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

2. Kriminalitas dari Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kriminalitas di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *sosial control* (kontrol sosial).³⁹

a. Teori Strain.

Menurut Durkheim satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.⁴⁰

b. Teori Penyimpangan Budaya (*cultural deviance theories*)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* adalah sebagai berikut:

³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), h. 55.

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 56-57

1) *Theory Sosial Disorganization*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.⁴¹

2) *Theory Differential Association*

Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku.⁴²

3) *Theory Culture Conflict*

Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan-aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.⁴³

c. Teori Kontrol Sosial

Menurut teori ini penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001) h.65 .

⁴²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h.66

⁴³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h.66

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminalitas

Tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk tindak kriminal seperti:

a. Pencurian

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.⁴⁴Pencurian melanggar pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara .

b. Tindak asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindak kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama 2 th 8 bln tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

c. Pencopetan

Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handpone dan lainnya milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, tangkas dan tidak diketahui oleh korban

⁴⁴Poerwardarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) h. 217.

maupun orang di sekitarnya.⁴⁵ Tindak kriminal ini memenuhi pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

d. Penjambretan

Penjambretan merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban. penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.⁴⁶

e. Penodongan dengan senjata tajam/api

Bentuk kriminal merupakan perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. Dalam KUHP dijelaskan tindak kriminal ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

f. Penganiayaan.

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

⁴⁵Pencopetan , diakses dari <http://bahasa.cs.ui.ac.id>, pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 22.00 wita.

⁴⁶Soenarto, *Bentuk-Bentuk Tindak Kriminalitas*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara,1994) h. 221.

g. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam bab XIX kejahatan terhadap nyawa pasal 338,339 dan pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

h. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun .

i. Korupsi

Korupsi dipahami sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan

menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah⁴⁷. Tindak pidana korupsi memenuhi pasal 209 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan hukuman 4 tahun penjara.

4. Jenis-Jenis Kriminalitas

Jenis-jenis kriminalitas dibagi menjadi⁴⁸:

a. Jenis-jenis kejahatan secara umum:

1) Rampok dan gangsterisme

Rampok dan gangster sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi illegal.

2) Penipuan-penipuan

Permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (*blackmailing*), ancaman untuk mempublisir skandal dan perbuatan manipulasi.

3) Pencurian dan pelanggaran

Pencurian dan pelanggaran tersebut antarlain: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

⁴⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta,Rajawali Pers, 2009), h.79

⁴⁸Ende Hasbi Nasaruddin, *Kriminologi*,(Bandung, Pustaka Setia,2016),h.177

b. Jenis kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan:⁴⁹

1) Menggunakan alat bantu.

Pelaku kriminal tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain sebagainya.

2) Tanpa menggunakan alat bantu.

Pelaku dalam melakukan tindak kriminal hanya dengan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.

3) Residivis

Residivis adalah penjahat yang berulang ke luar masuk penjara. Selalu mengulangi perbuatan jahat baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya.

4) Penjahat berdarah dingin.

Penjahat berdarah dingin adalah pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.

5) Penjahat kesempatan.

Yang dimaksud adalah penlaku kejahatan yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada tanpa direncanakan.

6) Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.

⁴⁹Ende Hasbi Nasaruddin, *Kriminologi*, (Bandung, Pustaka Setia,2016), h.178.

c. Jenis kejahatan menurut obyek hukum yang diserangnya:

- 1) Kejahatan ekonomi: penipuan, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang, penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu.
- 2) Kejahatan politik dan hankam (pertahanan dan keamanan): pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasis-rahasia negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin negara, kolaborasi dengan musuh, dll.
- 3) Kejahatan kesusilaan: pelanggaran seks, perkosaan, fitnah.
- 4) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

BAB III

Metodologi Penelitian

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.¹ Dengan demikian penelitian kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis angka-angka, akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan angka-angka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Polsek Rappocini Kota Makassar. Hal ini didukung dengan keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut.

¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h.12-13.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk melihat, meninjau, serta menganalisis permasalahan.

2. Pendekatan sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis karena pada akhirnya penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.²

C. Sumber Data

Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari informan melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah disusun oleh instansi atau pihak-pihak subyek penelitian.

Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa sumber informasi yang akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari

²Amiruddin dan ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

kepala Polsek Rappocini, penyidik serta individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam penyidikan atau kasus . Adapun informan tersebut adalah:

1. Kepala Polsek Rappocini Makassar, sebagai pimpinan atau Pembina dalam ruang lingkup kepolisian dan mengetahui efektifitas peraturan di wilayah Tamalate dan sekitarnya.
2. Penyidik Polsek Rappocini Makassar, yang menjadi pihak yang turun langsung untuk mengumpulkan bukti dari proses penyidikan.
3. Dinas Sosial Kota Makassar, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan rehabilitasi terkait gelandangan dan pengemis.

Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan data/informasi yang akan diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur tersebut, terutama diperoleh melalui Sektor Polsek Rappocini dan unit-unit di dalamnya sehingga diharapkan peneliti dapat temukan fakta tentang sebab-sebab atau bagaimana kasus yang terjadi yang disebabkan oleh gelandangan dan pengemis. Selain itu, penelitian ini juga akan mencari data/informasi dari sumber-sumber lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan antara pencari informasi dengan sumber informasi(informan). Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam pengumpulan data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran, dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, perilaku dan lain-lain.

Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, responden, topik penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi wawancara.⁴

Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam (*depth interview*) dimana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada pertanyaan yang sudah disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data secara mendetail atau terperinci.

3. Telaah dokumen

Telaah dokumen ini dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen (bentuk laporan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang pendapat, teori) yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.

³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.118.

⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h.73.

Pengumpulan data berarti suatu proses pencarian data dari tidak ada menjadi ada untuk keperluan penelitian, untuk mendapatkan data itu selain menggunakan wawancara dengan subyek secara langsung, juga dengan menelaah dokumen yang ada.

E. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan penyuntingan data pemberian kode, melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data, dan melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian.

Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data valid yang menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data yang sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, mengembangkan kategori dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data dengan membuang hal yang tidak penting, selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk susunan informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan letak geografis Polsek Rappocini

Pada awalnya wilayah hukum yang saat ini diduduki polsek Rappocini merupakan wilayah yang bernaung dibawah Polsek Tamalate, namun pada hari Rabu tanggal 07 Januari tahun 1998 kecamatan Tamalate dipecah menjadi dua, yaitu Tamalate dan Rappocini, sebagai tindak lanjut dari persetujuan Mendagri nomor 138/1242/PUOD tanggal 03 Mei 1996 berdasarkan Gubernur Sulawesi Selatan 538/VI/1996 tahun 1996, dengan luas wilayah 9,23 km yang berbatasan :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Barat Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate

Saat itu polsek tamalate masih memegang kendali dan menaungi kedua kecamatan tersebut. Akan tetapi karena desakan dan kebutuhan masyarakat kecamatan rappocini terhadap eksistensi penegak hukum maka dibentuklah polsek Rappocini pada tahun 2006, namun karena belum tersedianya tempat khusus untuk polsek rappocini, maka kedua polsek tersebut menjalankan kegiatan dan berkantor di tempat yang sama, hanya saja dibagi menjadi dua, polsek tamalate menempati lantai satu sebagai kantor dan polsek rappocini berkantor di lantai dua.¹

¹Brigpol Heru Arifin, Penyidik Polsek Rappocini, *Wawancara* ,Polsek Rappocini Makassar, 20 Juli 2017.

Setelah itu polsek Rappocini dipindahkan dan menempati kantor lurah Balang Parang di Jln.Nikel yang digunakan sebagai kantor sementara karena belum adanya bangunan sendiri, dan kemudian dengan alasan yang tidak beda jauh dari sebelumnya, polsek rappocini lalu dipindahkan lagi untuk berkantor di Jl.AP.Pettarani yang sekarang dijadikan kantor PJR, dalam kurun waktu yang terhitung singkat setelah itu polsek Tamalate dipindahkan karena sudah memiliki bangunan sendiri di Jl.Metro Tanjung Bunga yang menjadi kantor Polsekta Tamalate hingga saat ini.

Karena kantor sebelumnya sudah dikosongkan maka dengan pertimbangan bahwa letak kantor tersebut masih berada dalam wilayah Rappocini maka, polsek Rappocini kembali dipindahkan ke kantor pertama yaitu di Jl.Sultan Alauddin No.321,GN.Sari, Rappocini, Makassar SULSEL, yang hingga saat ini menjadi kantor Polsek Rappocini.²

2. Visi dan Misi Polsek Rappocini

a. Visi

Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah polsek rappocini dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah polsek Rappocini yang aman dan dinamis

b. Misi

1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.

²Brigpol Heru Arifin, Penyidik Polsek Rappocini, *Wawancara* ,Polsek Rappocini Makassar, 20 juli 2017.

2. Selalu melaksanakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan melindungi masyarakat.
3. Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preentif, preventif dan penegaka hukun yang terukur, profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
4. Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis
5. Menegakkan hukun secara cepat profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukun dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukun dan rasa keadilan.
6. Mengelola SDM polri di lingkungan polsek rappocini secara profesional dalam rangka optimalisasi tugas dan tujuan polsek Rappocini
7. Mengelol a sarana dan prasarana serta sumber daya materiil kesatuan dan rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.
8. Melakukan pelaksanaan fungsional kepolisian sehingga dapat mewujudkan polsek yang dapat di percaya masyarakat
9. Mewujudkan model pengelolaan kepolisian yang sistematis secara utuh, sinergi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan upaya mendekatkan polisi dan masyarakat melalui aktifitas nyata mendatangi, berkomunikasi saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis masyarakat.

B. *Dampak Gelandangan dan Pengemis terhadap tingkat kriminal di wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar*

Pada dasarnya kriminalitas merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindarkan ataupun dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terlebih lagi apabila di lingkungan masyarakat tersebut terdapat faktor-faktor yang mendukung terjadinya kriminalitas, salah satu contohnya adalah keberadaan gelandangan dan pengemis. Hal ini dengan mudah dapat kita jumpai di kota-kota besar, termasuk diantaranya kota Makassar, tingginya tuntutan hidup yang tak terelakkan acap kali memaksa sejumlah individu atau kelompok melakukan hal-hal yang diluar batas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut konstitusi Negara RI memberi jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara, secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi anak dan kesejahteraan sosial ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1), yang teks secara lengkapnya sebagai berikut:

- a) Pasal 28B ayat (2) yaitu : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b) Pasal 28 H ayat (1) yaitu: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas memperoleh pelayanan kesehatan”.
- c) Pasal 34 ayat (1) yaitu: “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, (2) negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Hal-hal tersebut diatas juga berkaitan dengan apa yang dituangkan dalam peraturan daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 Pasal 2.

Dari bunyi pasal-pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut maka negara membentuk Dinas Sosial yang bertugas untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial.

Namun bukan hanya permasalahan mengenai bagaimana menangani keberadaan gelandangan dan pengemis, akan tetapi hal yang juga memerlukan perhatian lebih adalah bagaimana menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh para gelandangan dan pengemis (gepeng) itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan gepeng memberi dampak tersendiri dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali pada permasalahan kriminalitas, baik itu berasal dari internal maupun eksternal golongan tersebut. Dan tentu saja, permasalahan seperti itu menjadi tanggung jawab pihak kepolisian yang pada kasus ini merupakan wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi hukum negara.

Dalam hal ini Polsek Rappocini sebagai tempat penelitian menjadi pusat kajian bagaimana dan apa saja dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan gelandangan dan pengemis terkhusus dalam ruang lingkup wilayah hukum polsek Rappocini, dan berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait maka dapat peneliti pahami bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis memang membawa dampak tersendiri dalam timbul dan terjadinya kriminal di kota Makassar terkhusus Rappocini.

Tak hanya dampak negatif seperti yang muncul di fikiran khalayak ramai, namun gepeng juga bisa dikatakan memberi bias positif pada masyarakat, karena

dengan melihat betapa mirisnya kehidupan menggelandang dan mengemis yang mereka lakoni maka masyarakat akan berfikir dan berupaya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan seperti itu.

Mengenai permasalahan hukum dan kriminalitas dalam ruang lingkup polsek Rappocini, dapat dikatakan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) juga mempengaruhi tingkat kriminal dan kasus kriminal oleh gelandangan dan pengemis yang kerap dijumpai pihak polsek rappocini diantaranya adalah, begal atau yang dalam wilayah hukum disebut curas atau pencurian dengan kekerasan yang bisa dijerat dengan pasal 365 KUHP, pencurian biasa yang dimuat dalam pasal 362 KUHP, pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan aktifitas kriminal namun tidak termasuk tindak pidana yang sering dijumpai adalah yang masyarakat kenal dengan istilah *isap lem* atau *ngelem*, dimana mereka menghirup lem dengan tujuan agar merasa mabuk karena terdapatnya kandungan *toluene* didalam lem yang dimana senyawa tersebut dalam lampiran II undang – undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan salah satu jenis prekursor narkotika, namun berdasarkan UU Narkotika, tidak diatur sanksi khusus bagi orang yang menggunakan lem untuk dihirup aromanya, sehingga apabila aparat menemukan pihak-pihak yang melakukan hal tersebut dalam hal ini gepeng maka hanya dilakukan pembinaan dan pemanggilan orang tua atau wali agar menjaga untuk tidak mengulangi aktivitas tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan kriminal dilakukan terkadang karena tuntutan hidup, namun tidak berarti setiap gelandangan dan pengemis berpotensi melakukan kriminal. Faktor eksternal juga dapat berpengaruh pada tingkah laku dan perbuatan, diantaaranya adalah lingkungan bergaul gepeng itu sendiri.

Tabel I
Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Gelandangan di Polsek
Rappocini Kota Makassar

No.	Tahun	Kasus	Jenis kasus		
			Curas (begal)	Kepemilikan Senjata api	Napza
1	2014	12	5		7
2	2015	10	3	1	6
3	2016	7	2	1	4
Jumlah		29	10	2	17

Sumber data : Arsip Penyidik Polsek Rappocini Kota Makassar

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa jumlah kasus kriminal yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis (gepeng), setiap tahunnya mengalami pengurangan.

Salah satu kasus kriminal di wilayah hukum Polsek Rappocini yang pelakunya merupakan gelandangan, dalam hal ini tindakan yang dilakukan adalah begal atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berencana dan berramai-ramai dengan 7 orang temannya dan sebelumnya tersangka yang dalam kasus ini bernama Takdir (19) juga pernah terjerat hukum karena merampas senjata api milik aparat kepolisian pada tahun 2016 di distrik hukum yang sama. Penyidik juga memaparkan bahwa tersangka digolongkan sebagai gelandangan karena memang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, pekerjaan tetap, bahkan ia juga tidak memiliki sanak saudara, dan pihak yang disebut sebagai wali dari tersangka pun terkesan lepas tangan dan tidak ingin dikait-kaitkan dengannya.³

³Brigpol Heru Arifin, Penyidik Polsek Rappocini, *Wawancara*, Polsek Rappocini Makassar, 20 Mei 2017.

Kasus tersebut hanya merupakan salah satu dari sekian kasus yang dilakukan oleh kaum marginal yang telah dijumpai pihak Polsek Rappocini. Dijelaskan pula bahwa ada beberapa kasus yang terjadi dan dilakukan oleh gelandangan dan pengemis yang tidak termasuk tindak pidana atau bisa saja tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana tetapi masyarakat tidak melaporkan ke pihak berwajib, contohnya ada beberapa pengemis yang ketika meminta-minta mereka memaksa dan bahkan mengancam jika tidak diberi, hal lain yang juga dapat kita temui di tempat umum adalah terkadang ada gelandangan yang melakukan pelecehan seksual namun tidak disadari atau bahkan diacuhkan, contohnya ketika sedang berkendara dan dijalanan yang macet atau di tempat putar atau balik arah terkadang para anak jalanan mencolek pengendara motor wanita, sedangkan diketahui bahwa pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik dan non-fisik, yang menyangar pada bagian tubuh atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Dan yang dapat dipahami dalam kasus ini adalah bahwa gelandangan dan pengemis (gepeng) yang melakukan tindak kriminal adalah mereka yang berusia muda, sedangkan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang termasuk lanjut usia meski jarang dijumpai yang melakukan tindak kriminal tetapi mereka tetap saja mengganggu ketertiban umum karena gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat seperti contohnya tidur di tempat atau fasilitas umum, menambah intensitas kemacetan karena mayoritas dari mereka mengemis

dan meminta-minta hingga masuk ke tengah jalan untuk mendatangi para pengguna jalan.⁴

C. Upaya mengatasi terjadinya Kriminal yang ditimbulkan oleh Gelandangan dan Pengemis di wilayah Polsekta Rappocini Kota Makassar

Istilah “lebih baik mencegah dari pada mengobati” tentu saja merupakan kalimat yang tidak asing lagi di telinga setiap orang, hal ini juga dapat diberlakukan jika menyangkut tentang bagaimana mengatasi kriminal yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis (gepeng).

Pada dasarnya jika kita ingin mengatasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis, terlebih dahulu mereka harusnya mendapat perhatian lebih agar tidak melakukan tindak kriminal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik pencegahan maupun penanganannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu.

Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Dan sisi si pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu, dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dan sisi pihak lain, apabila si pembuat tidak mau bertanggungjawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan.⁵

⁴Kompol Alimuddin, Kepala Polsek Rappocini, *Wawancara* ,Polsek Rappocini Makassar, 30 Mei 2017.

⁵Holda Na’ajiyah, *Mengentaskan-Anak-Terlantar*, di akses dari <http://www.globalmuslim.web.id.html>. Pada tanggal 30 juli 2017 pukul 10.01

Secara etik normatif kesejahteraan atau kebahagiaan bukan hanya sebatas aspek-aspek simultan akan tetapi sejauh mana pertanggung jawaban serta sejauh mana respek publik terhadap pemerintahannya. Kesadaran universal pemerintah kota makassar seyogyanya dapat menyentuh relung kemanusiaannya terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt dan tidak menjadikan segala program pemerintahan hanya sebagai seremonial belaka dengan hanya menghabiskan banyak anggaran.

Dan untuk memenuhi tanggungjawab tersebut maka pemerintah kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar, yang menyebutkan bahwa: pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁶

Pembinaan juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen jalan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum, pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk :

⁶Muh.Bakri, S.Sos., M.M, Kepala Seksi Bidang Pelayanan Rehabilitasi, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Prov.Sul-Sel, 29 Mei 2017

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat
- d. Menciptakan perlakuan yang abadi dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

Dalam PERDA Nomor 2 tahun 2008 dalam pasal 6 menyebutkan pula bahwa pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluas jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalan selain itu ada pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yakni pembinaan lanjutan, usaha rehabilitasi sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut dan partisipasi masyarakat, pembinaan pencegahan sebagaimana yang dimaksud meliputi :

- a. Pendataan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan, yaitu sebagaimana yang dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- c. Sosialisasi, hal ini dilakukan oleh instansi terkait, meliputi: sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.

- d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Usaha pembinaan yang dilakukan tidak hanya sampai disitu, selanjutnya diatur lagi mengenai pembinaan lanjutanyang dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagai upaya untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Adapun pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Perlindungan, dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko-posko berbaris di jalanan (*in the street*) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan aktifitasnya.
- b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktifitas di tempat umum,hal ini dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.
- c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, dan permainan adaptasi sosial (*outbond*).

- d. Pendekatan awal yaitu melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.
- e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Hal ini dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya.
- f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen secara rutin dan berkesinambungan
- g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan usaha rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, ada beberapa hal yang dilakukan untuk memberikan keterampilan kepada mereka demi kelangsungan dalam mencari mata pencaharian sebagaimana layaknya. Dan berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 hal-hal yang dilakukan dalam usaha rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya berupa :
 - a. Bimbingan mental spiritual
 - b. Bimbingan fisik
 - c. Bimbingan sosial
 - d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan
 - e. Bantuan stimulasi peralatan kerja
 - f. Pemenpatan
2. Untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen usia balita :
 - a. Pendekatan kepada kepala keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan
 - b. Melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup bermain alat, pengembangan bakat dan minat
3. Untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen usia sekolah;
 - a. Bimbingan mental spiritual
 - b. Bimbingan fisik
 - c. Bimbingan social
 - d. Bimbingan pra sekolah
 - e. Bantuan Stimulans beasiswa dan peralatan sekolah
 - f. Penempatan
4. Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan atau stake holder

5. Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis
6. Untuk pengemis usia produktif dilakukan dengan cara;
 - a. Bimbingan mental spiritual
 - b. Bimbingan spiritual
 - c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
 - d. Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha
 - e. pembinaan dan atau pemulangan ke daerah masing-masing
7. Untuk pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan penyaluran bakat seni, sehingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan hidup.

Selain beberapa jenis pembinaan yang dilakukan pemerintah yang telah dipaparkan diatas masyarakat juga dapat turut andil dalam rangka melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat selain itu dapat juga dilakukan pemberdayaan yang dalam hal ini termasuk pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan keluarga adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Adapun kegiatan pemberdayaan yaitu;

- a. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga
- b. Pelatihan kewirausahaan
- c. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif(UEP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kepolisian sektor Rappocini kota Makassar, dapat diketahui bahwa upaya implementasi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen telah dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan daerah dalam hal ini pihak dinas sosial kota Makassar sudah menerapkan konsep pembinaan, pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial, sedangkan dalam ruang lingkup Polsek langkah lanjutan yang telah dilakukan adalah dengan memberi sanksi yang dapat membawa efek jera bagi gelandangan yang telah terjerat masalah hukum, dan mempertegas pelaksanaan aturan yang ada sehingga dapat menekan pertumbuhan kasus kriminal yang dilakukan oleh gelandangan dan/atau pengemis (gepeng).⁷

Disamping itu upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak banyak lagi yang mengalami kerugian materil maupun moril secara umum yang dapat dilakukan dalam menghadapi kriminalitas yang kian marak membuat resah masyarakat, dan agar tidak menambah banyak korban kasus kriminal haruslah tercipta. Upaya-upaya penanggulangan tindak kriminalitas antara lain :

a. Upaya preventif.⁸

Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

⁷Kompol Alimuddin, Kepala Polsek Rappocini, *Wawancara* ,Polsek Rappocini Makassar, 30 Mei 2017.

⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja* , (Jakarta,Rajawali Pers, 2003), h.94.

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, meliputi :⁹

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹⁰ Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

⁹Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*,(Jakarta: Buku Kompas, 2001) h. 16-17.

¹⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja* , (Jakarta,Rajawali Pers, 2003), h. 96.

- 1) Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai didalam dan masyarakat .
- 2) Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana mati.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Gelandangan dan Pengemis pada Timbulnya Kriminalitas

Kriminalitas dalam masyarakat pada saat ini semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Realita tersebut semakin mencemaskan, mengingat pelaksanaan hukum di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Praktik peradilan hukum positif yang mengalami banyak penyelewengan dan pelanggaran hukum, yang justru dilakukan aparat penegak hukum, yang bermain mata dengan pihak-pihak tertentu yang menginginkan kasusnya dimenangkan atau diringkankan.

Praktek hukum yang seperti itu, tentu berbeda dengan hukum Islam. Hukum Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa takwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah swt berfirman dalam QS *Al-Nis* /4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْزُضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Sabab Al-Nuzul ayat di atas terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Thabari bahwa diceritakan dari Muhammad bin Al-Husain yang berkata, diceritakan dari Ahmad bin al-Mufdhil yang berkata, dari al-suda, tentang firman Allah di atas. Ayat di atas diturunkan kepada Nabi saw. Ada dua orang yang berselisih dan datang kepada Nabi saw. orang yang satu kaya dan orang yang lainnya miskin. Nabi Saw lebih condong kepada orang yang miskin. Nabi saw. berpendapat bahwa orang miskin tersebut tidak bersalah kepada orang yang kaya. Maka, Allah tidak menyukai kecuali Nabi saw. menegakkan keadilan, baik kepada orang kaya maupun orang yang miskin. Allah berfirman : “jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Dari ayat tersebut dapat kita pahami, peradilan Islam berlaku secara adil dan memuaskan para pihak, yang berarti Islam tidak membedakan siapa dan mengapa tindak kriminal itu dilakukan. Sehingga hukum yang sama berlaku juga bagi para gelandangan dan pengemis yang melakukan tindak kriminal, bahkan jika hal tersebut dilakukan untuk bertahan hidup. Selain tindak kriminal yang dilakukan gelandangan dan pengemis, keberadaan dan gaya hidup mereka yang dalam hal ini mengemis dan menjadikan fasilitas umum sebagai tempat berkumpul dan melakukan aktifitas lainnya termasuk pelanggaran terhadap ketertiban umum.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*.

Namun kita juga tidak dapat menghakimi bahwa gelandangan dan pengemis melakukan kejahatan karena tidak memiliki iman yang baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka melakukan tindak kriminal karena faktor ekonomi, namun disamping itu pula tidak dapat dipungkiri bahwa para gelandangan dan pengemis sangat membutuhkan arahan dan pengetahuan tentang agama karena tak jarang dari mereka hidup tanpa mengerti agama. Selain itu mereka juga menginginkan perlakuan yang layak dari masyarakat.¹²

Meskipun pada dasarnya mengemis dilarang dalam Islam, akan tetapi kita tidak boleh menyamaratakan semua pengemis/gelandangan, dan menuduh mereka macam-macam, karena hal itu termasuk dalam buruk sangka tanpa alasan. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah yang telah menjaga kita dari memintaminta, Allah berfirman dalam QS. Al- u /93: 10 :

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.”¹³ Ayat ini berlaku umum bagi semua peminta-minta (pengemis dan yang semisal), kecuali jika kita mengetahui bahwa dia adalah orang jahat. Islam menganjurkan kita semua agar berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita, dan memohon kepada Allah Ta’ala agar menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur dan *qana’ah* atas segala nikmatnya, merasa cukup dan menahan diri dari meminta-minta, karena orang yang mau bekerja, berarti dia menghormati dirinya dan agamanya.

¹²Takbir Anugrah, gelandangan (pelaku curas), Lembaga Permayarakatan Kelas I Makassar, 11 Agustus 2017

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan gelandangan dan pengemis khususnya di wilayah hukum Polsek Rappocini, meski tidak signifikan akan tetapi tetap membawa dampak tersendiri terhadap timbulnya kriminalitas, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa tindak kriminal yang dilakukan oleh gelandangan dan/atau pengemis (gepeng).
2. Untuk mengatasi permasalahan mengenai gelandangan dan/atau pengemis (gepeng) diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kota Makassar dengan instansi-instansi terkait seperti dinas sosial yang memengang fungsi pembinaan dan kepolisian yang menangani setiap tindak kriminal yang ditimbulkan, dan tak luput juga peran penting masyarakat didalamnya dan lingkungan tempat tinggal gelandangan dan pengemis (gepeng) itu sendiri.
3. Hukum Islam selalu berlaku adil, begitupun dalam permasalahan mengenai gelandangan dan pengemis maupun kriminalitas yang disebabkan. Dalam hal ini Islam tidak membedakan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh gelandangan dan pengemis atau bukan.

B. Implikasi Penelitian

Mengingat bahwa pemasalahan mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan hal yang bersifat *inheren* maka sudah seharusnya bahwa tidak ada pihak yang disalahkan ataupun dianggap tidak menjalankan fungsi dengan baik, alangkah baiknya jika masyarakat turut bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Sama halnya dengan fungsi kepolisian yang akan berjalan baik dengan dukungan penuh dari pihak-pihak lain. Penerapan hukum Islam juga akan sangat membantu dalam menangani permasalahan ini.

KEPUSTAKAAN

- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bungin. Burhan. *Penelitian Kualitatif* , Cet. 2; jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Parsons, Wayne, *Public Policy (pengantar teori dan praktik analisis kebijakan)* alih bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qurán dan Terjemahan*.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdak, 2009.
- Rosyada. Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 5; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.1 ; Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Tim Pengelola Short Cut. *Pengantar Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Resist Institute, 2011.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kartono, Kartini. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Supriyadi, Eko. *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Dimas Dwi Irawan, “*Pengemis Undercover, Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*”, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Buku Kompas, 2001.
- Hadianiti, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila. *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Jakarta: Depsos RI, 2005.

- Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial., *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Depsos RI, 2004.
- Ketut Sudhana Astika., "*Budaya Miskin di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Budaya Miskin di Masyarakat*", *jurnal ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ.Udayana.1 No.1* 2010. (20 Juli 2017)
- Rouf, Hury. "*Dibalik Gemerlapnya Kota*" artikel sinergia Vol.XIV/No.01/April-Mei 2008. (20 juli 2017)
- Isma Riskawati, Abdul Syani. "*Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)*", *Jurnal Sociologie* 1, no.1(28 juli 2017).
- Irsan Suandi, "Gelandangan dan Pengemis", *Blog Irsan Suandi*. <http://andisuandirsan.blogspot.com/2015/04/makalah-gelandangan-dan-pengemis.html> (10 Agustus 2017).
- Abi Safa, "*konsep kedermawanan dalam Islam*", <http://www.alislam-safa.com/konsep-dasar-kedermawanan-dalam-Islam/>
- Pengertian Kriminalitas, <http://www.pengertianmenurutahli.net/pengertian-kriminalitas-dan-contohnya/.html>, 19 Maret 2017
- Brain Harefa, "Makalah Gepeng", diakses dari http://www.academia.edu/6492300/MAKALAH_GEPENG, pada tanggal 11 Juni 2017
- Abdurrahman Wahid, "Gelandangan : Tinjauan Dari Pandangan Islam", komentar, <https://m.facebook.com/filegusdur/posts/258732910962259> , pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 21.30<http://www.globalmuslim.web.id.html>
- Pencopetan , <http://bahasa.cs.ui.ac.id>, pada tanggal 12 Juni 2017
- Kriminologi, diakses dari <http://edyblogspot.com-kriminalitas>, pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 21.30
- Eriyanto, Analisis Wacana: pengantar analisis teks media oleh Amien Rais, <http://books.google.com>books>, pada tanggal 11 Juni 2017, pukul 20.32
- Liabilities atau liabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban, Diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/liabilitas> pada 15 Juni 2017 pukul 19.16 WITA
- Maghfur Ahmad, "*Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan Pengemis (Gepeng)* " , *Jurnal Penelitian*, diakses dari <http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.Php/ Penelitian/article/view/108/87>, pada tanggal 11 juni 2017
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "PERDA No.2 Tahun 2008", Official Website Pemerintah Sul-Sel, <http://makassar.bpk.go.id/wp->

content/uploads/2010/11/PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2008-TENTANG-ANJAL-DAN-GEPEG.pdf

Pengertian gelandangan , Diakses dari <http://kbbi.web.id/gelandangan.html> pada 12 Juni 2017.

Pengertian pengemis, Diakses dari <http://kbbi.web.id/pengemis.html> pada 12 Juni 2017.

Godam64, “Arti Gepeng-Akronim Tidak Resmi Bahasa Indonesia”*Blog Godam64*. <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-gepeng-kepanjangan-dari-gepeng-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html?m=1> (10 juni 2017).

Suryanto, Perilaku Kriminal, diakses dari <http://suryanto.blog.unair.ac.id/2008/12/04/perilaku-kriminal-ditinjau-dari-aspek-psikologi-pelaku.html>, pada tanggal 10 Juni 2017.

Holda Na’ajiyah, *Mengentaskan-Anak-Terlantar*, di akses dari <http://www.globalmuslim.web.id.html>. Pada tanggal 30 juli 2017.

Lampiran – Lampiran
Dokumentasi Penelitian
Di Polsek Rappocini



**Wawancara dan pengambilan data, di ruang penyidik
Polsek Rappocini , bersama Brigpol Heru Arifin**



Wawancara dengan Kapolsek Rappocini, Bapak Kompol Alimuddin di ruang kapolsek Rappocini



**Wawancara kedua , di ruang penyidik Polsek Rappocini ,
bersama Brigpol Heru Arifin**



**POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR RAPPOCINI
Jalan Sultan Alauddin No 313 Makassar 90233**



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / S.Ket / 187 / VI / 2017

Referensi :

Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor : 6363/ S.01P/ P2T/ 05/ 2017 Tanggal 10 Mei 2107 Perihal Izin Penelitian.

Menerangkan di bawah ini :

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SHERDILLA DWI RATNASARI S |
| 2. No. Pokok | : | 10300113071 |
| 3. Program Studi | : | HPK |
| 4. Pekerjaan | : | Mahasiswa (S1) |
| 5. Alamat Kampus | : | Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa |

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian di Kantor Polsek Rappocini dari tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 24 Mei 2017 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Kriminal Di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar " dan yang bersangkutan selama kegiatan penelitian bersikap baik dan ramah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 31 Mei 2017
PIh. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR RAPPOCINI



ALIMUDDIN

KOMISARIS POLISI NRP 62000094

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 1758 /HPK/2017

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Kriminal di Wilayah Hukum Polsek Rappocini Kota Makassar

Gowa, 26 April 2017

Penyusun,



Sherdila Dwi Ratnasari S

Nim. 10300113071

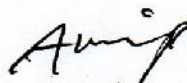
Pembimbing I



Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Nip. 19710712199703 2 002

Pembimbing II

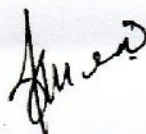


Ashar Sinilele, SH., MM., MH

Nip. 19690717 201411 1 001

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Nip. 19710712199703 2 002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Nip. 196210161990031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/06/2017

Samata, 8 Mei 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada

Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel.

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Sherdilla Dwi Raetmasari S
Nim	: 10300113071
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HPK
Semester	: VIII
Alamat	: Jl. ST Alauddin 3 No.54

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan dan Pengemis Terhadap Kriminal
di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dra.Nila Sastrawati,M,Si
2. Ashar Sinilele, SH.,MM.,MH

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Polsek Rappocini terhitung mulai tanggal 9 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata, 8 Mei 2017

Dekan
Dekan Fakultas Syariah & Hukum


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 269 Tahun 2017

T E N T A N G

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi **H P K** tanggal 24 Mei 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : **Tugas Penguji** melaksanakan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
Keempat : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 24 Mei 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 6 4 4 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6363/S.01P/P2T/05/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Walikota Makassar
2. Kapolres Rappocini

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : Sl. 1/PP.00.9/1861/2017 tanggal 08 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SHERDILLA DWI RATNASARI S.**
Nomor Pokok : 10300113071
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN KRIMINOLOGI DAMPAK GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP KRIMINAL DI WILAYAH POLSEK RAPPOCINI KOTA MAKASSAR "

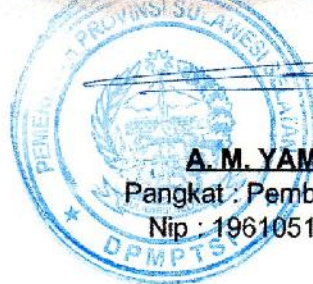
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 s/d 31 Mei 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 Mei 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
2. *Pertinggal.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 284 Tahun 2017
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2017

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Menunjuk saudara : 1. Dra. Nila Sastrawati, M.Si
2. Azhar Sinilele, S.H., M.H.
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Sherdilla Dwi Ratnasari S
NIM : 10300113071
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Pengaruh Gelandangan dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas (Studi Kasus Polsekta Tamalate, Sebuah Analisis Hukum Nasional dan Hukum Ketatanegaraan Islam)
 - Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNPB UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
 - Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di : Samata
Pada tanggal : 27 Maret 2017
Dekan,

W. P. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 284 Tahun 2017
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2017

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Dra. Nila Sastrawati, M.Si
2. Azhar Sinilele, S.H., M.H.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Sherdilla Dwi Ratnasari S
NIM : 10300113071
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Pengaruh Gelandangan dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas (Studi Kasus Polsekta Tamalate, Sebuah Analisis Hukum Nasional dan Hukum Ketatanegaraan Islam)

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis Ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNPB UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 27 Maret 2017

Dekan,



Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1153 Tahun 2017
T E N T A N G
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
N a m a : Sherdilla Dwi Ratnasari.S
N I M : 10300113071
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)
Hari/Tanggal : Rabu / 09 Agustus 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Kriminal Di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

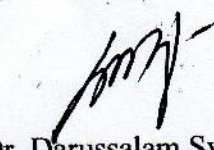
Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.SI
Penguji I : Dr. Hamzah Hasan, M.HI
Penguji II : Dr. Alimuddin, M.Ag
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 07 Agustus 2017

Dekan,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1301 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

Surat Permohonan :
Nama : Sherdilla Dwi Ratnasari
N I M : 10300113071
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)
Hari/Tanggal : Senin / 28 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Kriminologi Dampak Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Kriminal Di Wilayah Polsek Rappocini."

Menimbang

- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah /Skripsi;
- Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
- Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membentuk Panitia dan Penguji Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Penguji I : Dr. Hazah Hasan, M.Hi
Penguji II : Dr. Alimuddin, M.Ag
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Kedua
Ketiga

Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sherdilla Dwi Ratnasari S, lahir di Enrekang tanggal 15 Juli 1995 dan merupakan anak kedua dari pasangan Muh.Saleng dengan Sumiati. Jenjang pendidikan yang ditempuh mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 110 Lura, tahun 2001-2007, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP NEGERI 3 ANGGERAJA pada Tahun 2007-2010, dan melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA NEGERI 1 ANGGERAJA pada Tahun 2010-2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR dengan mengambil konsentrasi Strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.